



# LAPORAN EVALUASI

HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TRIWULAN II TAHUN 2023



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
KATA PENGANTAR.....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Dasar Hukum .....	2
1.4. Tata Cara Evaluasi.....	5
1.5. Sistematika.....	7
<b>BAB II. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD .....</b>	<b>9</b>
2.1. Program Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2022.....	9
2.2. Rencana Program dan Kegiatan, Target dan Pagu Indikatif .....	17
2.3. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Target dan Dana Dalam RKPD dan APBD .....	18
2.4. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RKPD .....	18
<b>BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL.....</b>	<b>23</b>
3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	23
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Prioritas Nasional .....	25
<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI .....</b>	<b>58</b>
4.1. Kendala Internal .....	58
4.2. Kendala Eksternal .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Rekomendasi .....	60

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antarkabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dilakukan secara berkala setiap triwulan. Penyusunan laporan tersebut diformulasikan berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan kepada Bappeda secara berkala setiap triwulan juga. Laporan ini merupakan hasil pencermatan dari tim pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 yang meliputi:

- 1) Penelaahan terhadap realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Penelaahan realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai masukan untuk penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III Tahun 2023.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Pangkalpinang, Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan  
Penelitian Pengembangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



ERRY INSANI  
Pembina Utama Madya  
NIP.197006201999031009

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pada Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, RKPD merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun setiap tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta merupakan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Rancangan APBD. Untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan dan hasil RKPD.

Selanjutnya evaluasi terhadap hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Melalui evaluasi hasil RKPD yang dilakukan, maka akan menjadi salah satu masukan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2023 adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 262 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- b. Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional, dengan cara melihat:
  - 1) Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 2) Realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);

- 14 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Deseases* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

- 23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- 27 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
- 28 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
- 29 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
- 30 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 14 Seri E);
- 31 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

#### 1.4. TATA CARA EVALUASI

Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

dilakukan dengan berpedoman pada tahapan dan tatacara pengendalian evaluasi RKPD Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan berdasarkan evaluasi hasil rencana kerja Perangkat Daerah.

Tata cara evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan berdasarkan Hasil Evaluasi Renja PD yang dilaporkan/disampaikan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Hasil RKPD untuk Triwulan II akan digunakan untuk dasar penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 serta Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III Tahun 2023;
- c. Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerjadan Anggaran RPD Provinsi/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									12=8+9+10+11		13=(12/7)X100%		14=6+2		15=(14/5)x100%		16			
3		Program																												
		Kegiatan																												
		Sub Kegiatan																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Prpgram																														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																														

Petunjuk Pengisian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaiberikut:

Tabel 1.2  
Interval dan Kriteria Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$>90\% \text{ s/d } \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$>75\% \text{ s/d } \leq 90\%$	Tinggi
3.	$>65\% \text{ s/d } \leq 75\%$	Sedang
4.	$>50\% \text{ s/d } \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peremdagri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.5 SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

### BAB1 PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, tata cara evaluasi, dan sistematika laporan.

### BAB2 CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Berisi target sasaran daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, capaian terhadap target kinerja dan realisasi anggaran.

### BAB3 DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN

## PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Memuat prioritas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas nasional.

### BAB4 KENDALA YANG DIHADAPI

Memuat kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023;

### BAB5 PENUTUP

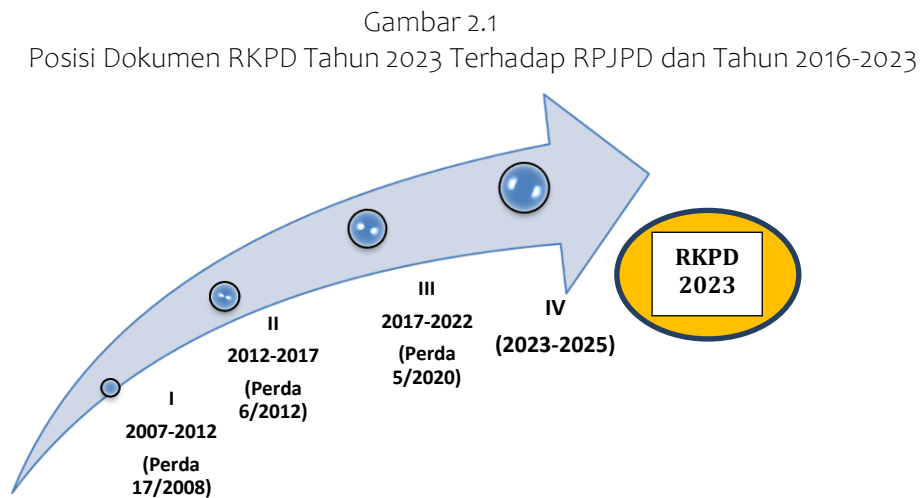
Berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 dan rekomendasi untuk penyusunan dokumen perencanaan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 serta Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III Tahun 2023.

## BAB 2

### CAPAIANTARGETKINERJADANPENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKP

#### 2.1. PROGRAM PRIORITAS DAN CAPAIAN SASARAN DAERAH TAHUN 2023

Posisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dari target pembangunan tahun terakhir pada Tahap ke IV Periode RPJDP 2005-2025 dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023 (diolah)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun IV (keempat) dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan RKP Tahun 2023, perencanaan pembangunan nasional mengusung tema “Peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKP yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026. Kemudian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam

penyusunan RKPD Provinsi Tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Gambar 2.1  
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2023 Terhadap RPD 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034;
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2026;
4. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah.

Mencakup Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023. Dinamika pembangunan dan perekonomian daerah memunculkan berbagai isu dan permasalahan yang masih mengemuka selama pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 baik di tingkat nasional maupun regional yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Tema RKPD Tahun 2023.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJPD 2005-2025 tahap keempat (2023-2025) untuk tahun 2023.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang

berkorelasi dengan upaya untuk:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap *Sustainable Development Goals*, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sasaran pembangunan nasional;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Justifikasi Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

- a. Rendahnya PDRB sub sektor pertanian;
- b. Rendahnya PDRB sub sektor perikanan;
- c. Rendahnya PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian;
- d. Rendahnya PDRB sub sektor industri pengolahan;
- e. Rendahnya PDRB sub sektor perdagangan;
- f. Rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik;
- g. Rendahnya ekspor;
- h. Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah;
- i. Rendahnya pembangunan manusia;
- j. Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi;
- k. Rendahnya tata kelola pemerintahan;
- l. Kurangnya ketersediaan infrastruktur;
- m. Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang;
- n. Tingginya resiko bencana;
- o. Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan;
- p. Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk;
- q. Lambatnya penurunan kemiskinan;
- r. Rendahnya kesempatan kerja;
- s. Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2023. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi

beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas utama pembangunan dan tidak mengalami perubahan baik pada RKPD 2023 sebanyak 7 Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi

Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hidup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan mempunyai daya saing.

3. Pembangunan Demokrasi

Fokus Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

4. Pembangunan Pemerintah

Fokus Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pembangunan Wilayah

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara

meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Fokus kegiatan membangun pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada Tahun 2023;
5. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
6. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 dilaksanakan melalui 6 (sepuluh) tujuan yang ditandai dengan 20 (dua puluh) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat

dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target tujuan, sasaran makro pembangunan, serta realisasi nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

INDIKATOR (i)	TARGET (ii)	REALISASI (iii)	INTERPRETASI (iv)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	5,13	Merupakan capaian triwulan II tahun 2023
Tingkat Kemiskinan (%)	4,3	4,52	Merupakan capaian pada bulan Maret 2023
Tingkat Pengangguran (%)	4,47	3,89	Merupakan capaian pada bulan Maret 2023
Gini Ratio	0,239	0,245	Merupakan capaian pada bulan Maret 2023
IPM	71,91	-	Belum ada realisasi

Sumber: RPD Prov. Kep. Babel 2023-2026 dan BRS BPS 2023 (diolah)

Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPD. Dokumen RKPD Tahun sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa semua indikator makro pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2023 ada yang belum dan sudah mencapai target sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,13 persen, melambat dibandingkan capaian triwulan II-2022 yang tumbuh sebesar 5,27 persen. Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen pengeluaran juga mengalami peningkatan dimana laju pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPR. Kemudian, untuk ekonomi Bangka Belitung ini sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum mencapai target.

2) Tingkat Kemiskinan

Secara umum pada periode September tahun 2012 s.d Maret tahun 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi menunjukkan tren yang menurun. Pada periode September 2012 hingga Maret 2023 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,75 ribu orang yaitu dari 69,44 ribu orang pada September 2012 menjadi 68,69 ribu orang pada Maret 2023. Tingkat kemiskinan menurun dari 5,37 persen pada September 2012

menjadi 4,52 persen pada Maret 2023. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 sampai Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022-Maret 2023 antara lain adalah:

1. Pemulihan Ekonomi pasca pandemi Covid-19 sudah berangsur membaik, hal ini mempengaruhi aktivitas ekonomi penduduk dan angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I-2023 membaik dibandingkan triwulan I-2022. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,37 persen. Secara q-to-q (triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2023) dan jika triwulan I-2023 dibandingkan triwulan III-2023 pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -4,51 persen dan -1,99 persen.
  2. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2023 tercatat sebesar 2,99 persen (y-on-y). Jika dilihat per komponen dari PDRB pengeluaran secara q to q, hanya konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 0,23 persen namun kinerjanya menunjukkan perlambatan jika dibandingkan triwulan I-2023 dengan triwulan III-2023 dengan laju hanya sebesar 0,54 persen.
  3. Pada Maret 2023 inflasi tahun kalender sebesar 0,67 persen dan secara tahun ke tahun sebesar 5 persen. Pada periode Maret 2023 dibandingkan September 2022, tercatat angka inflasi umum sebesar 1,16 persen.
  4. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,89 persen, turun sebesar 0,29 persen poin dibandingkan dengan TPT Februari 2022 sebesar 4,18 persen.
  5. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan. NTP kondisi Maret 2023 tercatat sebesar 123,43, mengalami kenaikan 4,4 poin dibandingkan NTP September 2022 yang tercatat 119,03.
  6. Harga komoditas sawit (TBS) pada bulan Maret 2023 rata-rata Rp. 2.328/kg sementara pada bulan September 2022 rata-rata harga komoditas sawit (TBS) Rp.1.600/kg.
- 3) Tingkat Pengangguran
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,89 persen, turun sebesar 0,29 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.
- 4) Gini Ratio

Pada Maret 2023, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,449. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,245.

5) IPM

Belum ada realisasi pada triwulan II tahun 2023.

Adapun sasaran dan capaian sasaran Tahun 2023 yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Target Sasaran dan Capaian RKPD  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET RKPD 2023	CAPAIAN	INTERPRETASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,03		
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,85		
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	2,95		
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,86		
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	6,50		
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	2,70		
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	8,13		
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	25,00		
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,91		
10	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,90		
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68,25		
12	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	25,50		
14	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,65		
15	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,36		
16	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,721		
17	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,79		
18	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,30		
19	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET RKPDP 2023	CAPAIAN	INTERPRETASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,43		

Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan BPS Kep Babel Tahun 2023 (diolah)

## 2.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Setiap program prioritas memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan pertimbangan yang tergambarkan di dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah.

- a. Program dan kegiatan prioritas provinsi yang mendukung kebijakan nasional  
Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta RKP tahun 2023 yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama di tahun 2023 dan mendukung target capaian prioritas nasional. Adapun program prioritas untuk tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena untuk program prioritas tahun tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

b. Dukungan terhadap kebijakan nasional

Sama halnya seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pada RKPD Tahun 2023 penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta RKP tahun 2023 yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama di tahun 2023 dan mendukung target capaian prioritas nasional.

c. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan dan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang dimasukkan sebelum Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dan tetap dilanjutkan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

**2.3. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, TARGET, DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD**

Dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan “*money follow priority programme*”. Pagu indikatif Perangkat Daerah pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebesar Rp.3.452.250.044.126.

**2.4. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD**

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 dihitung berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Triwulan II Tahun 2023. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata capaian kinerja tiap Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 masih terdapat beberapa Perangkat Daerah capaian kinerja dan anggaran sebesar 0,00 persen, sehingga mempengaruhi total capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan Perangkat Daerah tersebut tidak membuat tabel berdasarkan Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun ada kenaikan capaian kinerja dan anggaran apabila dibandingkan Triwulan II Tahun 2023, Meskipun ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023 kepada Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini sebenarnya sangat memengaruhi total capaian kinerja dan anggaran dalam Pengendalian dan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan. Jumlah anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar Rp.3.003.395.933.940, tetapi jika diluar UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp.2.998.907.047.148. Hal ini mengingat bahwa UPTD tersebut tidak ada keajiban untuk menyampaikan dan membuat laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah. Total rata-rata realisasi kinerja seluruh program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan 29 Perangkat Daerah sebesar Rp.1.056.606.927.417 dengan total rata-rata capaian anggaran sebesar 39,48 persen dan kinerja sebesar 29,22 persen dengan predikat masing-masing Sangat Rendah atau SR.

Tabel 2.3.

Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN BELANJA (%)	REALISASI (Rp)	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN		PREDIKAT KINERJA	
				ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	ANGGARAN	KINERJA
1	Dinas Pendidikan	867.774.681.780	238.301.797.498	27,46	50,00	SR	SR
2	Dinas Kesehatan	91.881.001.795	41.700.147.171	45,38	10,96	SR	SR
3	RSUD	168.306.276.827	47.230.548.269	28,06	-	SR	-
4	RSJD	60.821.596.500	25.074.505.662	41,23	39,66	SR	SR
5	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	292.689.619.572	85.424.149.379	29,19	22,95	SR	SR
6	Satuan Polisi Pamong Praja	25.029.298.264	9.775.897.131	39,06	-	SR	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.373.329.650	6.745.216.083	34,82	47,81	SR	SR
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.428.065.174	15.834.298.699	43,47	-	SR	-
9	Dinas Tenaga Kerja	21.040.745.806	10.088.895.322	47,95	25,00	SR	SR
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Keluarga Berencana	15.029.187.819	5.198.869.608	34,18	-	SR	-
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	71.754.316.876	24.346.684.951	33,93	40,01	SR	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.431.997.512	25.408.933.528	42,75	-	SR	-

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN		PREDIKAT KINERJA	
				ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	ANGGARAN	KINERJA
13	Dinas Perhubungan	44.612.144.238	19.004.892.455	42,60	-	SR	-
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.239.893.448	11.742.484.507	52,80	-	R	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	24.512.183.694	8.467.978.961	34,55	-	SR	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.806.833.721	5.883.868.159	39,74	-	SR	-
17	Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	48.006.353.109	23.179.567.248	48,28	-	SR	-
18	Dinas Kearifan dan Perpustakaan	15.531.004.540	7.675.796.923	49,42	3,70	SR	SR
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	48.908.836.019	14.840.311.595	30,34	29,15	SR	SR
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24.650.308.567	11.974.009.796	48,58	36,78	SR	SR
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.532.555.357	12.624.765.377	32,76	30,12	SR	SR
22	Sekretariat Daerah	175.021.254.543	75.558.194.266	43,17	60,93	SR	R
23	Inspektorat Daerah	24.974.139.179	11.451.617.979	45,85	21,62	SR	-
24	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	21.762.427.100	9.130.895.207	41,96	55,00	SR	R
25	Badan Keuangan Daerah	540.462.660.950	233.531.921.457	43,21	31,73	SR	SR
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.529.842.383	16.228.863.048	48,40	-	SR	-
27	Sekretariat DPRD	123.078.102.497	45.518.405.051	36,98	53,97	SR	R
28	Badan Penghubung Provinsi	13.831.112.948	5.945.628.204	43,05	54,10	SR	R
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54.698.277.285	8.708.783.847	15,92	-	SR	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2.998.907.047.148</b>	<b>1.056.606.927.417</b>	<b>39,48</b>	<b>29,22</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>

Sumber: Laopran Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 (diolah)

Keterangan:

SR	:SangatRendah	( $\leq 50\%$ )
R	: Rendah	(> 50% s/d $\leq 65\%$ )
S	: Sedang	(> 65% s/d $\leq 75\%$ )
T	: Tinggi	(> 75% s/d $\leq 90\%$ )
ST	: Sangat Tinggi	(>90% s/d $\leq 100\%$ atau >100%)

## BAB 3

### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

#### 3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun merupakan penjabaran tahun kedua dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024) **“Peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 sesuai dengan Rancangan RKP 2023.

Melanjutkan pendekatan yang telah dirintis sejak RKP 2017, politik perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2023 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan bukan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows programme* tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dalam penyusunan RKP 2023 pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2023 tema utama adalah **“Peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga (K/L), daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan; dan
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional

lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Dengan memperhatikan:

- Perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2023 dengan pendekatan pada penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah;
- Pengendalian perencanaan;
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja non- K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

Sasaran yang harus dicapai pada akhir Tahun 2023 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar sebesar 5,3-5,9 persen;
2. IPM secara nasional berkisar antara persen 73,29-73,35 persen;
3. Tingkat kemiskinan pada kisaran 7,0-8,0 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,3-6,0 persen;

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional maupun daerah yang tertuang dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Keselarasan Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Makro Antara Target Nasional dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Indikator	Target		Realisasi	
	Nasional	Bangka Belitung	Nasional	Bangka Belitung
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9	5,27	5,17	5,13
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	4,3	9,36	4,25
Tingkat Pengangguran (%)	5,3-6,0	4,47	5,45	3,89
Gini Ratio	0,375-0,0378	0,239	0,388	0,245
IPM	73,29-73,35	71,91	-	-

Sumber: Perubahan RPD 2023-2026, Permendagri 17/2021, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, BRS BPS Prov. Kep. Babel 2023 (diolah)

### 3.2. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Memperhatikan hakekat pemerintahan daerah sebagai hasil desentralisasi dalam negara kesatuan (termasuk dalam konteks pembangunan *decentralized development*), maka dapat dipahami bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perlu dicapai keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Lebih lanjut, dari perspektif manajemen kinerja (*performance management*) yang lebih dikenal dengan prinsip *cascading*, bahwa harus dapat diidentifikasi kontribusi kinerja/pencapaian sasaran pembangunan daerah kepada pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun IV (keempat) dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan RKP Tahun 2023, perencanaan pembangunan nasional mengusung tema **“Peningkatan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah  
Tahun 2023

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PN : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS					115,321,680,779	
	PP : PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI DENGAN MENGUTAMAKAN PENINGKATAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	15,7	Program Penge lolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi	75,000,000	Urusan ESDM
		Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,8%	Program Penge lolaan Ketenaga listrik	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	75,000,000	Urusan ESDM
	PP : PENINGKATAN KUANTITAS/KETAHANAN AIR UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m <sup>3</sup> )	4,7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota	117,344,000,000	Urusan PUPR
	PP : PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	92,8	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	135,000,000	Urusan Pangan
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,00			35,000,000	Urusan Pangan
		Angka Kecukupan Protein (AKP)(gram/kapita/hari)	57,0	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	40,000,000	Urusan Pangan
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU)	5,5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		100,000,000	Urusan Pangan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	4,5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		715,130,607	Urusan Pangan
	PP : PENINGKATAN PENGELOLAAN KEMARITIMAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	25,1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	300,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	66,800,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	66,750,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	<72	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	3,500,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai dengan 30 GT	750,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3,450,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan	150,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Mo dal Asing dan/atau Tenaga kerja Asing		
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	1,831,465,111	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	175,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	1,800,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kab/Kota dalam 1 (Satu Daerah Provinsi)	50,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
	PP : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,8				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	63	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	676,152,000	Urusan UMKM
				Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	398,802,465	Urusan UMKM
		Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	35,000,000	Urusan UMKM
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90,000,000	Urusan UMKM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kab/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	50,000,000	Urusan UMKM
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kab/ kota	165,480,000	Urusan UMKM

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					dalam 1 (satu) daerah Provinsi		
	PP : PENINGKATAN NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA, DAN INVESTASI DI SEKTOR RIIL, DAN INDUSTRIALISASI	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	50,000,000	Urusan Pertanian
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	100,000,000	Urusan Pertanian
					Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	512,899,660	Urusan Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	400,000,000	Urusan Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	150,000,000	Urusan Pertanian
					Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	125,000,000	Urusan Pertanian
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	167,906,655	Urusan Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam	20,000,000	Urusan Pertanian

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Daerah Kab/Kota		
				Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	150,000,000	Urusan Pertanian
					Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	200,000,000	Urusan Pertanian
		Kontribusi PDB kemaritiman (%)	7,2				
		Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (%)	6,5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	120,000,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	5,2	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2,000,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	784,875,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	792,212,100	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
		Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.439-1.452	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2,300,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
		Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	6,9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	290,173,750	Urusan Modal dan PTSP

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	253,489,900	Urusan Modal dan PTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	452,726,250	Urusan Modal dan PTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal Yang Ruang Lingkup nya Lintas Daerah Kab / Kota	46,000,000	Urusan Modal dan PTSP
					Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	436,770,000	Urusan Modal dan PTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	367,133,820	Urusan Modal dan PTSP
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	82,668,900	Urusan Modal dan PTSP
		Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	50,000,000	Urusan Tenaga Kerja
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (%)	3,2-3,7		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	521,064,826	Urusan Tenaga Kerja
		Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (%)	15,0			71,874,802	Urusan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	20,9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	37,464,514	Urusan Tenaga Kerja

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	14,0			44,615,000	Urusan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	20,0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50,000,000	Urusan Tenaga Kerja
					Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Provinsi	61,248,861	Urusan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab/Kota	74,440,980	Urusan Tenaga Kerja
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 11 Daerah Provinsi	134,076,288	Urusan Tenaga Kerja
					Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kab/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kab/ Kota	120,000,000	Urusan Tenaga Kerja
				Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	186,459,290	Urusan Tenaga Kerja

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PP : PENINGKATAN EKSPOR BERNILAI TAMBAH TINGGI DAN PENGUATAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	4,8	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	120,000,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
		Neraca perdagangan barang (USD miliar)	3,0		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	115,000,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	25,0	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	33,000,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
					Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	152,300,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
	PP : PENGUATAN PILAR PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING EKONOMI	Kontribusi sektor jasa keuangan/ PDB (Persen)	4,3				
		Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	21,1				
		Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)	N.A.				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(Peringkat)					
2	PN : MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING					95,418,518,078	
	PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	N.A	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	250,000,000	Urusan DP3ACSKB
			2,21	Program Penge lolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	50,000,000	Urusan DP3ACSKB
			N,.A	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	45,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	105,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75,000,000	Urusan DP3ACSKB
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui	75,000,000	Urusan DP3ACSKB

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	PP : Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang ter cakup dalam program jaminan sosial	N.A	Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sampungan Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	84,000,000	Urusan Sosial
					Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1,244,820,600	Urusan Sosial
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	N.A		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	428,995,000	Urusan Sosial
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kab/ Kota Asal	20,000,000	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	195,010,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	106,389,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	327,000,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	65,000,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	167,576,483	Urusan Sosial

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	43,392,500	Urusan Sosial
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	929,841,132	Urusan Sosial
				Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	757,200,000	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlanjar di Dalam Panti	63,946,277	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	85,870,567	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	575,943,567	Urusan Sosial
	PP : PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2,810,000,000	Urusan Kesehatan
		Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	18,6				
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	11,6				
		Angka pre valensi kontracepsi modern/modern	62,5				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Contra ceptive Prevelance Rate (mCPR)					
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,0	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	32,071,397,457	Urusan Kesehatan
		Prevalensi wasiting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7,5				
		Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,19				
		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	231,0				
		Jumlah kab/kota yang men capai eliminasi malaria	365,0				
		Insidensi hepatitis B (%)	1,39				
		% merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9				
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (%)	21,8				
		% tekanan darah tinggi	34,1				
		% fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	80,0				
		% rumah sakit terakreditasi	90,0				
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	50,000,000	Urusan Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas	275,300,000	Urusan Kesehatan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	950,100,000	Urusan Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	20,000,000	Urusan Kesehatan
					Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	20,000,000	Urusan Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Layanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	40,707,576,090	Urusan Kesehatan
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100,000,000	Urusan Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ting	849,927,800	Urusan Kesehatan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kat Daerah Provinsi		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebu tuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	14,342,980,000	Urusan Kesehatan
					Pengembangan Mutu dan Peningkat an Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	11,000,000	Urusan Kesehatan
	PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA	Program Pengemban gan Kurikulum	Penetapan Kuriku lum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100,000,000	Urusan Pendidikan
		Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA	Program Guru Dan Tenaga Kependidik an	Pemindahan Pen didik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kab/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	50,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengemban g an Kurikulum	Penetapan Kuri kulum Muatan Lokal Pendidik an Khusus	50,000,000	Urusan Pendidikan
		Rata-rata La ma Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Tahun)	8,95	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelo laan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	34,235,900,000	Urusan Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah Pendu duk Usia 25 Tahun Keatas (thn)	13,79				
					Pengelolaan Pendi dikan Sekolah Menengah Kejuruan	33,621,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5,201,300,000	Urusan Pendidikan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14,021,420,000	Urusan Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1,000,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1,358,296,479	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	200,000,000	Urusan Pendidikan
	PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,87	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	123,496,000	Urusan DP3ACSKB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Urusan DP3ACSKB
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	92,647,000	Urusan DP3ACSKB

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	175,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Menurun	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	50,450,000	Urusan DP3ACSKB
					Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	25,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	75,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	125,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	53,756				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	25,000,000	Urusan DP3ACSKB
				Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	83,407,000	Urusan DP3ACSKB
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1,240,000,000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	560,000,000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	N.A	Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	84,000,000	Urusan Sosial

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	N.A		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1,673,815,600	Urusan Sosial
		Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	1,850,000				
		Bidang Tanah yang didistribusi	N.A				
		Bidang tanah yang dilegalisasi	N.A	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar kasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kab/Kota Asal	20,000,000	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	195,010,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	106,389,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	327,000,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	65,000,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	167,576,483	Urusan Sosial

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	43,392,500	Urusan Sosial
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	929,841,132	Urusan Sosial
				Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	139,550,000	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlan tar di Dalam Panti	63,946,277	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	85,870,567	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlan tar di dalam Panti	575,943,567	Urusan Sosial
	PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angka tan kerja berpen didikan menengah ke atas	48.4				
		Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University					
		a. Top 200	0				
		b. Top 300	1				
		c. Top 500	2				
		Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	47				
3	PN : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN					12,768,277,387	

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BU DAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER		N A	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ke tertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5,764,050,000	SATPOL PP
					Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Gubernur	285,000,000	SATPOL PP
					Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	-	SATPOL PP
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	525,084,414	SATPOL PP
	PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA		N A	Program Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,250,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
					Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (satu) Daerah	187,500,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Provinsi		
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota	1,995,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pembinaan Sejarah	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	912,500,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	312,500,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
					Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	300,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengelolaan Permuseuman	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	875,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
	PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENINGKUKHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N A				
	PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN DAN BERKARAKTER			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	50,000,000	Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	311,642,973	Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
4	PN : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					40,629,473,684	

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	94	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	750,000,000	Urusan PUPR
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	84.8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	750,000,000	Urusan PUPR
		Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	84.8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan PUPR
		Rasio outstanding KPR terhadap PDB	58.23				
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	82.07%	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, Dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi		Urusan ESDM
		Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	2.98	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota	11,761,700,000	Urusan PUPR
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	75.28%				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(%)					
		Jumlah Daerah Irigasi yang imodernisasi	3				
		Luas lahan pertanian padi dan non- padi yang beririgasi me ningkat (Ha)	116142.7083				
		Provinsi dengan penururan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20				
	PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	Panjang jalan tol baru yang ber operasi dalam 5 tahun (2.500 km)	N A	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	24,778,351,684	Urusan PUPR
		Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)	N A	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,000,000	Urusan Perhubungan
					Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200,000,000	Urusan Perhubungan
	PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)	N A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1,457,250,000	Urusan Perhubungan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	118,620,000	Urusan Perhubungan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Jalan (LLAJ)			
	PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	100	Program Penge lolaan Ketenaga listrik	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	75.000.000,-	Urusan ESDM
		Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1268				
	PP : TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8.8	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Kominfo
		Persentase pengguna internet (%)	79.2				Urusan Kominfo
		Persentase populasi yang di jangkau oleh jaringan bergerak pitale bar (4G) Existing Q2 2019: 97,59%	98.5				Urusan Kominfo
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Penge lolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingk up Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Kominfo
					Kegiatan Pengelolaan e- overn ment di Lingk up Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Kominfo
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi	300,000,000	Urusan Kominfo
				Program Penyelenggaraan Persandian	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian	225,000,000	Urusan Kominfo

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Untuk Pengamanan Informasi	untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
					Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	88,552,000	Urusan Kominfo
5	PN : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM					3,021,595,000	
	PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	1,000,000,000	Urusan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55.3				
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	59.5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,751,937,000	Urusan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	63.5				Urusan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	74,658,000	Urusan Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	60,000,000	Urusan Lingkungan Hidup

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				(PPLH)			
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	60,000,000	Urusan Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Hutan	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	50,000,000	Urusan Kehutanan
					Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	25,000,000	Urusan Kehutanan
	PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)					
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)					
	PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	12.8	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada	53.1				Urusan Lingkungan Hidup

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sektor lahan (persen)					
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	9.3				Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2.5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Urusan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Urusan Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Urusan Lingkungan Hidup
6	PN : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUK HANKAM DAN TRANS FORMASI					10,376,340,437	

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PELAYANAN PUBLIK						
	PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95.47				
	PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan Hukum	0.69				
	PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian / Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	80	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	796,366,000	Bakuda
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	70				
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kab/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	45				
					Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	211,050,000	Bakuda
	PP : MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL	Global Fire Power Index	0.24				
		Global Terrorism Index	4:34		Koordinasi dan Pengelolaan Perben daharaan Daerah	257,068,000	Bakuda
		Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	429,472,000	Bakuda
				Program Pengelolaan Barang Milik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	587,488,000	Bakuda

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Daerah			
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	828,501,000	Bakuda
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	130,520,000	Bakuda
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	536,092,918	Bappeda
					Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96,833,300	Bappeda
					Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	271,172,000	Bappeda
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	364,547,150	Bappeda
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	227,089,300	Bappeda
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	185,861,433	Bappeda

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,473,723,350	Inspektora t
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	319,980,000	Inspektora t
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	205,650,000	Inspektora t
				Program Penataan Organisasi	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	190,000,000	Biro Organisasi
					Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	383,608,500	Biro Organisasi
				Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	570,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
					Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	570,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
					Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	167,785,975	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	234,221,337	BKPSDM
					Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	250,637,587	BKPSDM
					Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	568,035,000	BKPSDM

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2023			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	135,000,000	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	91,637,587	BKPSDM
					Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	294,000,000	BKPSDM

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

## BAB 4 KENDALA YANG DIHADAPI

Secara umum kendala yang dihadapi adalah pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Triwulan II Tahun 2023 tidak jauh berbeda terutama pada Perangkat Daerah penanggungjawab program/kegiatan/sub kegiatan.

### 4.1. KENDALA INTERNAL

- a. Belum terlaksananya penandatanganan kontrak paket kegiatan karena masih dalam tahap proses lelang;
- b. Anggaran Kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK belum bisa dilaksanakan karena menunggu pergeseran anggaran antar sub kegiatan sesuai dengan URK DAK;
- c. Beberapa kegiatan memang dijadwalkan pada Triwulan III ataupun di triwulan selanjutnya dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun dan terdapat dalam DPA;
- d. Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 pada Triwulan II masih bisa dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Dikarenakan ada beberapa pengadaan alat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan belum terdapat di SIPD;
- e. Harga standar disistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku yang dimana harga berbeda mengikuti tempat atau daerah masing-masing;
- f. Dalam Pelaksanaan belanja tahun anggaran 2023 menggunakan aplikasi belanja online sementara untuk penyediaan di kabupaten belum memenuhi syarat dan belum siap untuk menggunakan aplikasi online;
- g. Adanya beberapa Perangkat Daerah dalam menyusun formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan Formulir E.55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran dan kinerja hasil pelaksanaan RKPD serta menyulitkan penyusunan laporannya. Antara hasil capaian kinerja dan anggaran yang ada dilampiran berbeda dengan laporan yang disampaikan. Idealnya harus sama;
- h. Adanya beberapa Perangkat Daerah yang tidak mencantumkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran triwulanan tahun yang akan dievaluasi;
- i. Dalam Pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah, masih ditemukan adanya Perangkat Daerah yang mencantumkan faktor pendorong dan faktor

penghambat serta tindak lanjut yang dilakukan dalam mencapai kinerja Renja Perangkat Daerah tidak secara mendetail atau masih bersifat umum;

- j. Beberapa Perangkat Daerah kualitas SDM masing kurang, hal ini terlihat dari hasil laporan yang disampaikan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### 4.2. KENDALA EKSTERNAL

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. Belum optimalnya koordinasi antara pihak Perangkat Daerah dengan Bappeda selaku koordinator pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 Jumlah anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar Rp.3.003.395.933.940, tetapi jika diluar UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp.2.998.907.047.148. Hal ini mengingat bahwa UPTD tersebut tidak ada keajiban untuk menyampaikan dan membuat laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah. Total rata-rata realisasi kinerja seluruh program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan 29 Perangkat Daerah sebesar Rp.1.056.606.927.417 dengan total rata-rata capaian anggaran sebesar 39,48 persen dan kinerja sebesar 29,22 persen dengan predikat masing-masing Sangat Rendah atau SR.

### 5.2. REKOMENDASI

Sama halnya seperti triwulan sebelumnya, bahwa upaya percepatan pencapaian target kinerja RPD dan RKPD periode selanjutnya maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap Perangkat Daerah agar konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sebagaimana telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) per subkegiatan;
- b. Pelaksanaan pembangunan melalui pihak ketiga agar dilakukan secara terkoordinasi dengan mengoptimalkan ULP dengan memperhatikan aturan yang berlaku serta kualitas hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga meminimalisir hambatan dan kegagalan dalam proses lelang atau tender;
- c. Agar Perangkat Daerah dapat meningkat kinerja dan anggaran dalam program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 dengan melakukan berbagai macam terobosan atau langkah-langkah strategis dengan berkoordinasi dengan Bappeda atau K/L yang bersangkutan terutama yang berkaitan dengan juknis. Mengingat masih adanya Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 capaian kinerja dan anggaran seluruh program masih di bawah 50% atau Sangat Rendah (SR);
- d. Kepala Perangkat Daerah agar memudahkan atau mengupayakan percepatan dalam layanan administrasi atau proses pencairan dana/keuangan mengingat

kelambatan penyerapan alokasi anggaran akan berdampak pada keterlambatan pada proses pembangunan dan layanan kepada masyarakat dan tidak menumpuk diakhir tahun;

- e. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu mempermudah pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan serta evaluasi lainnya salah satu seperti SAKIP baik dari Bappeda maupun Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Melakukan pertemuan secara berkala di internal Perangkat Daerah terkait upaya dalam mencapai target kinerja dan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalantepatwaktu dengan hasil yangmaksimal;
- g. Penguatan dari Bappeda melalui mitra melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan serta berkoordinasi dengan Kemenetrian Dalam Negeri sebagai K/L pembina;
- h. Perlu ditingkatkan komitmen dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 baik perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bappeda agar memberikan teguran kepada Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja secara lengkap dan tepat waktu.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335

PANGKALPINANG 33149